

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut secara berkesinambungan dan selalu ditingkatkan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan baik itu pemerintah maupun masyarakat.

Peningkatan kualitas dan kuantitas kebutuhan tersebut berjalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan sarana rekreasi lain bagi masyarakat. Sedang sarana sumber daya alam yang tersedia bersifat terbatas dan rentan terhadap kerusakan dan hilangnya suatu ekosistem atau daerah tertentu.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah dan kebutuhan masyarakat, mengundang resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kesenjangan didalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tekanan kebutuhan atau perencanaan sebuah pembangunan yang tidak matang. Hal ini dapat mengganggu serta merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem serta kesenjangan budaya masyarakat yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat.

Untuk mencegah kemerosotan kualitas lingkungan dan sumber daya alam, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan maksud agar lingkungan dan sumberdaya alam serta masyarakat tersebut tetap terpelihara keberadaan dan kemampuannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan bahkan dapat menguntungkan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh dasar-dasar pertimbangan pelestarian lingkungan, sumberdaya alam serta struktur dan budaya masyarakat yang ada disekitar pusat pengembangan.

Dalam konteks Negara Kesatuan Indonesia, telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan yang terakndung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebsar-besarnya kemakmuran rakyat*"¹. Hal ini dapat dilihat sebagai antisipasi dampak kerusakan terhadap lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh Negara. Namun pembangunan terhadap objek wisata itu hendaknya jangan sampai menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan ekosistem yang ada, tapi justru dapat meletarikan dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada disekitarnya. Adanya kegiatan kepariwisataan dengan sendirinya akan meningkatkan tarap hidup masyarakat, namun tentunya haruslah terlebih dahulu disusun sebuah konsep pengelolaan yang berbasis masyarakat.

Pembangunan kegiatan kepariwisataan seringkali mengahantui para penentu kebijakan baik tingkat nasional maupun regional terbukti, pemanfaatan alam untuk kepariwisataan masih nampak sangat hati-hati sehingga malah menimbulkan

¹Undang-undang Dasar 1945

stagnasi dalam pengembangan usaha wisata alam maupun penciptaan paket-paket wisata yang justru mampu menampilkan daya tarik alam yang beragam. Hal ini tentunya dapat berakibat fatal, karena kemiskinan akan variasi jenis dan ragam paket wisata dapat menenggelamkan Indonesia dari hiruk pikuk kepariwisataan di tingkat ASEAN, bahkan tingkat dunia sekalipun.

Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Kementrian Negara Pariwisata dan Kebudayaan berasumsi bahwa bagaimanapun juga, alam Indonesia adalah aset wisata yang perlu dijaga, dilestarikan sekaligus dimanfaatkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang berdasarkan kepada pembangunan wisata yang berkualitas dan mampu menjamin pengembangan berkelanjutan (*sustainable tourism development and community based on tourism*) yang meliputi² :

- Keindahan
- Keaslian (*originality*)
- Kelangkaan (*scarcity*)
- Keutuhan (*wholesomeness*)
- Keaneka-ragaman budaya, flora dan fauna, ekosistem serta gejala alam.

Kelima aset tersebut, apabila dikombinasikan, diramu dan dikemas secara profesional, akan menjadi paket unggulan yang memiliki nilai daya tarik yang tinggi bagi wisatawan.

²Happy Marpaung, *Pengetahuan Pariwisata*, Alfabeta, Bandung, 2000 hal 23

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu daerah yang cukup strategis yang terletak di Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi-potensi wisata yang sangat indah dan memiliki daya jual yang tinggi baik untuk wisatawan domestik maupun manca negara. Salah satu tempat yang memiliki daya jual itu adalah Goa Wisata Seplawan yang terletak di Dusun Katerban, Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Pengunungan Menoreh bagian selatan, Kabupaten Purworejo.

Selain memiliki keindahan tersendiri, Goa Seplawan juga mempunyai nilai sejarah tersendiri dari tentang masa lalu Bangsa Indonesia,. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda pusaka (peninggalan sejarah) seperti Lingga Yoni, Arca Kencana, juga terdapat situs-situs sejarah lainnya.

Paket goa wisata Seplawan pernah mengalami masa keemasan pada tahun 1979 sampai dengan tahun 80-an. Sejak dimasuki untuk pertama kalinya oleh masyarakat secara beramai-ramai dan ditemukannya barang purbakala, goa Seplawan menjadi tempat yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik itu lokal, domestik dan manca negara³.

Hal ini kemudian menimbulkan inisiatip pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun Goa Seplawan, ini dibuktikan dengan keseriusan pemerintah kabupaten dalam memenuhi fasilitas wisata yaitu jalan, taman, kamar mandi dan lain-lain diareal komplek goa Seplawan.

³http://sssg-indonesia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=399:profil-provinsi-jawa-tengah&catid=18:profil-daerah&Itemid=53

Namun pada tahun 90-an, minat para wisatawan untuk datang ke goa Seplawan semakin menurun, hingga pendapatan baik pemerintah maupun masyarakat yang berada dikomplek goa Seplawan menjadi menurun.

Hal ini kemudian semakin berkelanjutan sampai saat ini, hal ini dibuktikan dari banyaknya bangunan-bangunan yang berada disekitar komplek yang dulu dibangun menjadi rusak dan tidak terawat. Ditambah lagi dengan pembangunan kamar mandi yang sampai sekarang masih menjadi polemik yang berkembang didalam masyarakat. Karena pada waktu pembangunan banyak masyarakat yang mengatakan bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan komplek.

Konsep pembangunan ini juga kemudian membuktikan bahwa perlunya peran serta dan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah objek wisata.

Didalam goapun banyak sekali coretan-coretan pada dinding-dinding goa sehingga menimbulkan kerusakan dan terhentinya proses terbentuknya ornamen yang ada didalam goa. Memang ini adalah ulah oknum-oknum yang tidak menyadari akan keindahan dan keaslian goa, namun apabila terus didiamkan dan diabaikan maka kerusakan yang timbul semakin lama akan semakin parah.

Melihat begitu pentingnya pengelolaan goa Seplawan secara lebih baik guna peningkatan tarap hidup dan kemajuan perekonomian masyarakat yang berada disekitar goa Seplawan khususnya dan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purworejo umumnya maka perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana

pembangunan fasilitas dan pemenuhan standar sebuah objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentunya akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat yang ada disekitar goa khususnya dan masyarakat Kabupaten Purworejo pada umumnya. Sebab bagaimanapun kemajuan pengelolaan kawasan wisata khususnya wisata goa Seplawan, tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah dengan program peningkatan ekonomi kemasyarakatan.

Tanpa sebuah program pengelolaan yang baik, sumberdaya yang tersedia dan sangat menarik itu akan sia-sia dan terbengkalai dan akhirnya akan mengalami kerusakan.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM GOA SEPLAWAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007-2008”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan: ***“Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Alam Goa Seplawan di Kab. Purworejo tahun 2007 - 2008”***

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengembangan wisata goa Seplawan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan goa wisata Seplawan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Manfaat Penelitian.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan bagi para penentu kebijakan dalam melakukan implementasi terhadap pengembangan pariwisata Indonesia pada umumnya dan pariwisata regional menyangkut pengembangan wisata alam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

- a. Mendapatkan kejelasan bagi masyarakat mengenai nasib pengelolaan Goa Wisata Seplawan dan manfaat yang jelas dari pengelolaan itu terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berada disekitar goa.

- b. Menambah koleksi bahan pustaka bagi mahasiswa Univ. Muhammadiyah Yogyakarta pada umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi tertentu. Pada bagian ini penulis akan mengemukakan definisi teori-teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

1. Implementasi Kebijakan

Kebijakan adalah semacam jawaban suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah.⁴

Hein dan Eluau menyatakan kebijakan (*policy*) adalah suatu keputusan yang tetap yang ditandai dengan adanya perhubungan dan keberulangan pada bagian-bagian dari keduanya yang membuat tunduk padanya.⁵

Menurut Miftah Thoha, dalam arti luas kebijakan (*policy*) mempunyai dua aspek pokok antara lain :

⁴Hogger Wert, Ilmu Pemerintahan, erlangga Jakarta, 1983, hal 4

⁵Charles O'Jones, Pengantar Kebijakan Publik, Raja Grafindo Persada, jakarta, 1992, hal 26

- a. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan *even* tunggal. Dengan demikian sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan baik untuk mendamaikan "*claim*" dari pihak-pihak konflik atau menciptakan "*incentive*" bagi tindakan bersama dengan pihak-pihak yang menetapkan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.⁶

Sedangkan proses kebijakan adalah sebagai aktivitas melalui mana kebijakan dibuat. Proses itu terdiri dari 6 tahapan yaitu :

- 1) Perumusan Masalah
- 2) Pembuatan Agenda
- 3) Pembuatan Kebijakan
- 4) Adopsi Kebijakan
- 5) Penerapan Kebijakan
- 6) Evaluasi Kebijakan

Dari berbagai pendapat diatas, penulis merumuskan kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan suatu keputusan yang membuatnya tunduk pada keputusan tersebut.

⁶ Miftah Thoha, Dimensi-dimensi administrasi negara, rajawali Press, Jakarta, 1993, hal 57-58.

Sementara itu menurut Santoso, study mengenai pelaksanaan kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan, dia mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

*"Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan public melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik antara pelaksana kebijakan, sedangkan didalam pelaksanaannya kebijakan itu tidak hanya bersifat teknis administrative belaka, tetapi melibatkan juga masalah-masalah politik, dengan demikian study implementasi kebijakan mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak berhenti hanya pada pertanyaan apa yang terjadi."*⁷

Memperkuat pendapat diatas, Abdul Wahab mengemukakan pendapatnya :*"Fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam Ilmu Kebijakan Negara disebut "Policy Delivery System" yaitu sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki."*⁸

Jelas sekali banyak pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Semua kebijakan negara, apapun bentuknya, dimaksudkan untuk memengaruhi dan mengontrol perbuatan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah/negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu

⁷ Amir Santoso, Jurnal Ilmu Politik, suatu pengantar, Gramedia Jakarta, 1989 hal 8

⁸ Silichin Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak efektif.

Menurut pendapat Abdulah⁹: *"Implementasi adalah upaya mewujudkan pilihan dan keputusan untuk menjadi kenyataan. Sementara pendapat lain menyatakan implementasi tidak bisa dipisahkan dari proses perencanaan sekalipun hanya menunjuk kepada hasil akhir. Hal ini menunjukkan tanggung jawab perencana."*

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan public adalah untuk mendapatkan arah agar tujuan-tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Karena itu, hal ini akan menyangkut pada penciptaan sistem pelaksanaan kebijakan yang meruakan alat khusus yang disusun untuk mencapai tujuan khusus. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan pernyataan tujuan scara tulus, sasaran dan cara-cara yang diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Keseluruhan proses yang semula bersifat umum telah diperinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Program kemudian diperinci lagi dalam beberapa proyek yang saling terkait dan sengaja didesain untuk mencapai keseluruhan sasaran kebijakan atau dengan kata lain menyebutkan proyek sebagai intrumen yang lazim digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan.

⁹ Abdulah M Syukur, *Teknik-teknik Implementasi Kebijakan*, Gramedia, Jakarta, 1998

Untuk lebih memahami pentingnya implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model implementasi kebijakan, yakni model implementasi menurut D. A. Masmanian dan P. A. Sabatier, Grindle serta Model Van Horn, berikut ini :

a. Model Daniel Masmanian dan Paul A. Sabastier

Menurut Daniel Masmanian dan Paul A. Sabatier bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada seluruh proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan tersebut.

Menurut Masmanian dan Sabatier, ada dua persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan, yaitu kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan, menganggap bahwa suatu implementasi akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan, sehingga model ini disebut model *Top Down*.

Lebih lanjut dijelaskan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi ialah :

- 1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
- 2) Dukungan publik
- 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok.
- 4) Dukungan dari pejabat atasan
- 5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Gambar I.1

Model Implementasi Kebijakan Menurut Masmanian dan Sabatier

Mudah/tidaknya suatu masalah-masalah dikendalikan :

1. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran
2. Prosentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

A. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi.

1. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
2. Dipergunakannya teori kausal yang memadai.
3. Ketetapan alokasi sumber dana.
4. Keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana.
6. Rekrutmen pejabat pelaksana.
7. Akses formil pihak luar.

B. Variabel diluar kebijakan yang dipengaruhi proses implementasi.

1. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi.
2. Dukungan publik.
3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok.
4. Dukungan dari pejabat atasan.
5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan penjabat-pejabat pelaksana.

C. Tahap-tahap dalam proses implementasi (Variabel Tergantung)

Output Kebijakan	Kesediaan	Dampak Nyata	Dampak Output	Perbaikan
Badan ² pelaksana...kelompok sasaran.....	output kebijakan.....	output kebijakan.....	kebijakan sebagai.....	mendasar
mematuhi output			persepsi	dalam UU
Kebijakan				

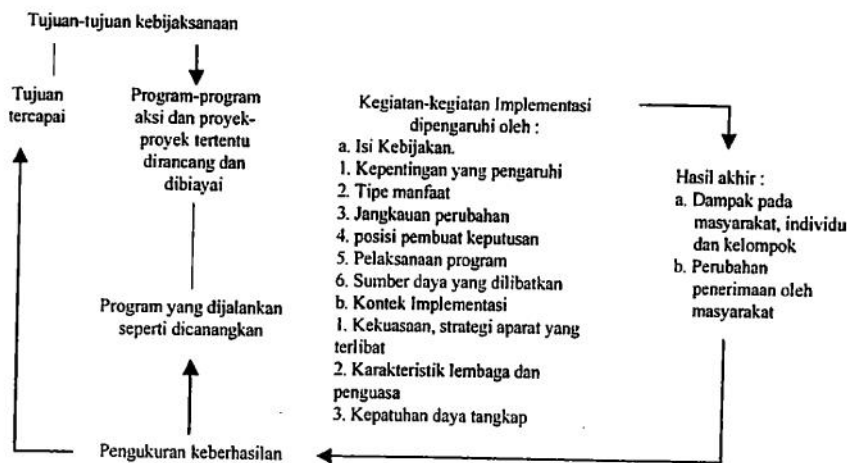
Sumber : Samudra Wibawa, *Pengantar Metodologi Kebijakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 23

b. Model Grindle

Menurut Grindle bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Study ini melihat adanya tiga dimensi dalam organisasi yaitu tujuan, pelaksanaan tugas dan kaitan organisasi dengan lingkungan. Ide dasar Grindle adalah bahwa kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dengan biaya yang telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan.¹⁰

Gambar I.2

Model Implementasi kebijakan menurut Grindle



¹⁰ Samudra Wibawa, *Pengantar Metodologi Kebijakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 (hal 23)

Sumber : Samudra Wibawa, *Pengantar Metodologi Kebijakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal 23

Isi kebijakan :

1. Kepentingan yang mempengaruhi.

Kepentingan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.

2. Tipe manfaat.

Suatu kebijakan yang memberikan manfaat dan langsung dapat dirasakan oleh sasaran, bukan hanya formal, ritual dan simbolis akan lebih mudah diimplementasikan.

3. Derajat perubahan yang diharapkan.

Kebijakan cenderung lebih mudah diimplementasikan jika dampak yang diharapkan memberikan hasil yang pemanfaatannya jelas dibandingkan yang bertujuan terjadi perubahan sikap dan perilaku penerimaan kebijakan.

4. Letak pengambil keputusan.

Kedudukan pembuat kebijakan akan mempengaruhi implementasi selanjutnya pembuatan kebijakan yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang tinggi akan lebih mudah dan mempunyai wewenang dalam pengkoordinasian organisasi dibawahnya.

5. Pelaksanaan program.

Keputusan siapa yang ditugasi untuk mengimplementasikan program yang ada dapat mempengaruhi proses implementasi dan hasil akhir yang diperoleh. Dalam hal ini tingkat kemampuan, keefektipan dan dedikasi yang tinggi akan berpengaruh pada proses.

6. Sumber daya yang digunakan dalam program, bentuk, besar dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan kebijakan.

Konteks Implementasi meliputi :

1. Strategi yang dipergunakan dalam proses, kekuasaan dari badan pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
2. Kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan sangat berpengaruh pada proses.

Kepatuhan dan daya tangkap, kepatuhan dapat berupa dukungan dari elit politik, kesediaan instansi pelaksana birokrasi yang ditugasi melaksanakan program dari elit politik, juga kepatuhan penerima manfaat/sasaran program. Sedangkan daya tangkap merupakan kepekaan lembaga publik seperti birokrasi terhadap kebutuhan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan.

c. Model Van Meter dan Van Horn

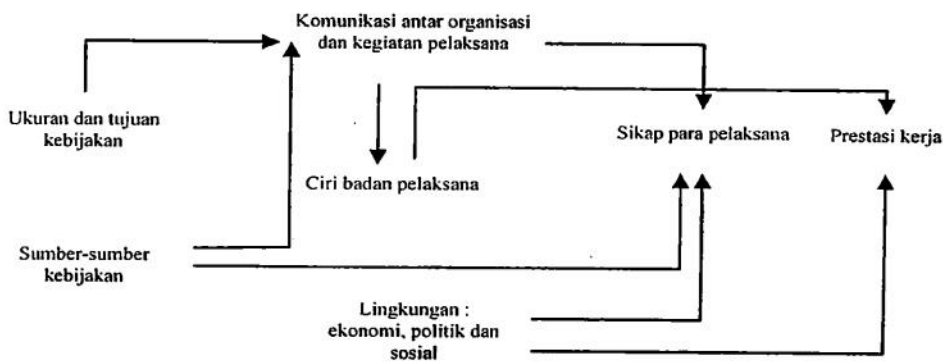
Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bahan-bahan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar hubungan

dilingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian adalah sikap para pelaksana mengantarkan pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan.

Untuk lebih jelasnya, model dari Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut :

Gambar I.3

Model Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan van Horn



Sumber : Samudra Wibawa, *Pengantar Metodologi Kebijakan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991:23

Dengan melihat berbagai pendapat dari para ahli tentang implementasi yang diuraikan dimuka terdapat beberapa kesamaan dalam pendekatan implementasi. Hal ini karena ada elemen terminologi yang berbeda.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan. Implementasi kebijakan akan dikatakan berhasil jika memenuhi lima kriteria keberhasilan yang menurut Nakamura adalah :

- a. Pencapaian tujuan kebijakan.
- b. Efisiensi.
- c. Keputusan kelompok
- d. Daya tanggap klien
- e. Sistem pemeliharaan.

Setiap implementasi dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang diharapkan atau memperoleh hasil. Karena pada prinsipnya suatu kebijaksanaan dibuat adalah untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Efisiensi pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan keseimbangan antara biaya/dana yang dikeluarkan, waktu pelaksanaan, sumber daya manusia yang dipergunakan dan kualitas pelaksanaan kebijakan. Keputusan kelompok sasaran memberikan arti penting pada pelaksanaan program karena kelompok sasaran inilah yang terkena dampak langsung dari program yang dilaksanakan.

Partisipasi dan peran aktif dari kelompok sasaran merupakan daya tanggap yang positif untuk mendukung keberhasilan kebijakan karena masyarakat merasa ikut memiliki terhadap kebijakan dan ikut bertanggung jawab dengan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Sistem pemeliharaan dimaksudkan untuk berkelanjutan dan kelancaran suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan pemeliharaan yang intensif dan kontinyu maka suatu kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan.

Sedangkan Edward III ada empat hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Komunikasi sebagai upaya suatu pesan dari komunikator sehingga menimbulkan dampak tertentu terhadap komunikasi. Dalam implementasi kebijakan komunikasi difungsikan untuk menghubungkan antara aparat pelaksana ataupun penyampaian pesan dari pemerintah kepada publik.
- b. Sumber daya, dukungan sumber daya sangat diperlukan untuk implementasi kebijakan. Dimana sumber daya tersebut berupa Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kebijakan ataupun sumber dana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang mutlak diperlukan.
- c. Sikap pelaksana, sikap dari pelaksana ikut menentukan terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan mengingat peranannya sebagai implementator sehingga kemampuan dari aparat pelaksana perlu ditingkatkan sehingga keberhasilan kebijakan dapat lebih mudah tercapai.
- d. Organisasi pelaksana, sebagai wadah untuk menjalankan dan mengkoordinasikan setiap pelaksana dan jalan tidaknya suatu kebijakan.¹¹

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Abdul Wahab faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan adalah:

- a. Sasaran dan standar kebijakan.

Suatu kebijakan haruslah memiliki sasaran dan standar yang akan dicapainya.

Standar dan sasaran menjelaskan rincian tujuan kebijaksanaan secara

¹¹ Silichin Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

menyeluruh. Melalui penentuan standar dan sasaran akan diketahui keberhasilan-keberhasilan yang dicapai.

b. Sumber Daya.

Kebijaksanaan menuntut ketersediaan sumber daya yang akan memperlancar implementasi. Sumber daya dapat berupa dana dan inisiatif lain yang akan mendukung implementasi secara efektif.

c. Pola komunikasi internal yang jelas.

Implementasi yang efektif selalu akan menuntut standar dan sasaran kebijakan yang jelas. Kejelasan ini ditunjang dengan pola komunikasi inter organisasi yang jelas sehingga tujuan yang akan dicapai tersebut dapat dioptimalkan oleh para pelaksana kebijakan.

d. Karakteristik badan pelaksana.

Berkaitan dengan karakteristik birokrasi pelaksana meliputi norma, dan hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

e. Kondisi sosial ekonomi dan politik.

Menurut model ini, kondisi ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Yang terpenting menurut fokus analisis dari berbagai model implementasi tersebut diatas adalah pencapaian tujuan-tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

Implementasi kebijakan yang dalam operasionalnya adalah program, dalam prosesnya terdapat tiga unsur pendukung yang penting dan mutlak.

Unsur pendukung itu adalah :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran yang diharapkan akan menerima manfaat dari pelaksanaan program tersebut, baik perubahan maupun peningkatan.
3. Unsur pelaksanaan (Implementator) yaitu organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.¹²

Kebijakan atau program yang diimplementasikan tersebut pada dasarnya merupakan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam usaha tujuan pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya, ini berarti bahwa kebijakan yang diimplementasikan bukan saja perlu membuahkan perubahan fisik tetapi juga menghasilkan hal-hal dengan cara tertentu sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kemampuan yang besar untuk memilih dan menanggapi perubahan itu.

¹²Abdulah M Syukur, Teknik-teknik Implementasi Kebijakan, Gramedia, Jakarta, 1998, Hal 52.

2. Pariwisata

a) Pengertian Pawisata.

Pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Kebutuhan untuk melemaskan pemikiran dan kejenuhan dalam menghadapi dan menjalani aktifitas sehari-hari.

Aktivitas dilakukan selama mereka tinggal ditempat yang dituju dan fasilitas dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perjalanan wisata dilakukan dipengaruhi oleh keberadaan ekonomi, fisik dan kesejahteraan sosial wisatawan yang melakukan kegiatan wisata.

Harapan dan penyesuaian dibuat oleh penduduk yang menerima mereka dan terdapat peran perantara dan instansi pengelola perjalanan wisata menjadi penengah antara wisatawan dan penduduk didaerah wisata.¹³

Menurut Hari Karyanto,¹⁴

"Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan."

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1990,

"Wisata adalah kegiatan perjalanan yang sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukaela, bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata"¹⁵.

¹³Drs. Happy Marpaung, Pengetahuan Pariwisata, Alfabeta Bandung, hal 13

¹⁴ Hari Karyanto, *Kepariwisataan*, PT Gramedia Widya Sarana Indonesia Jakarta, 1997 hal 15

Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana agar wisatawan membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya selama melakukan perjalanan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat akan meningkatkan pengeluaran mereka dan kemungkinan menambah dorongan makin banyak orang akan ikut serta pada kunjungan berikutnya jika kesan yang dibawa adalah pengalaman wisata yang menarik, yang akan membangkitkan perusahaan jasa seperti transportasi, hiburan, akomodasi dan jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan perjalanan wisata.

Perkembangan perjalanan wisata dipengaruhi pula oleh pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang terus mengalami peningkatan. Pariwisata memiliki peranan utama dalam perekonomian dan kepentingan sosial. Lebih dari 270 juta wisatawan menghabiskan \$ 92 milyar US setiap tahun di beberapa tempat. Hal ini merupakan suatu bagian yang besar dalam sektor pendapatan. Dengan semakin berkembangnya dunia ini jumlah wisatawan akan bertambah sebanyak 60 % per-tahun.¹⁵ Pariwisata juga memberikan pengaruh pada sektor ekspor suatu negara dan mengerakkan orang-orang dari suatu negara ke negara lain.

¹⁵Undang-undang RI No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

¹⁶Drs. Happy Marpaung, Pengetahuan Pariwisata, Alfabeta Bandung, hal 14

b) Objek Wisata

terdapat banyak jenis daya tarik wisata dan dibagi ke dalam berbagai macam sistem klasifikasi daya tarik. Secara garis besar daya tarik wisata diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi¹⁷ :

1. Daya tarik alam
2. Daya tarik budaya.
3. Daya tarik buatan manusia.

Walaupun demikian ada yang membagi jenis objek wisata dan daya tarik wisata ini ke dalam dua kategori saja, yaitu :

1. Objek dan daya tarik wisata alam.
2. Objek dan daya tarik wisata sosial budaya.

Namun semua objek wisata itu tetaplah harus dikelola dan memiliki perencanaan yang matang dalam pemanfaatan objek wisata tersebut. Sebab tanpa ditangani dengan baik semua akan menjadi sebuah produk yang gagal dan terjadi kegagalan capaian hasil pengolahan.

Perencanaan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam maupun sosial budaya harus berdasarkan pada kebijakan rencana pembangunan nasional maupun regional. Sebab jika kedua kebijakan rencana tersebut belum disusun, tim perencana pengembangan objek daya tarik wisata harus mampu mengasumsikan rencana kebijakan yang sesuai dengan area yang bersangkutan.

¹⁷ Ibid hal 80

c) Jenis Wisata

Sebelum melakukan pengembangan terhadap suatu wilayah untuk dikelola manji objek wisata terlebih dahulu harus dipahami terlebih dahulu apa yang patut untuk di jual sebagai wisata.

Daya tarik alam, daya tarik budaya, daya tarik buatan manusia tanpa diolah dengan baik akan terasa hambar dan tidak akan menarik untuk dinikmati dalam waktu yang lama, karena akan membosankan dan untuk menghindari hal itu diperlukan pemahaman yang pasti tentang jenis wisata yang akan ditampilkan.

Menurut Drs. Happy Manurung, SH, MH. Jenis wisata digolongkan menjadi dua :

1. Daya tarik wisata alam.

- a. Pantai.
- b. Wisata Tirta/Bahari
- c. Wisata Pengunungan.
- d. Wisata Daerah Liar dan Terpencil.
- e. Taman dan Daerah Konservasi.
- f. Health Resort

2. Daya tarik wisata Sosial-Budaya

- a. Wisata peninggalan sejarah keurbakalaan dan monumen.
- b. Museum dan fasilitas budaya lainnya.
- c. Pola kehidupan.
- d. Desa wisata.

e. Wisata keagamaan, etnis dan nostalgia

Untuk melihat seberapa besar kemungkinan pariwisata berkebang pada wilayah tersebut, baik pemerintah maupun pengusaha wisata harus terlebih dahulu memahami profil wisatawan yang akan menikmati atau menjadi konsumen wisata di daerah tersebut.

Profil wisatawan merupakan karakteristik spesifik dari jenis-jenis wisatawan yang berbeda yang berhubungan erat dengan kebiasaan, permintaan dan kebutuhan mereka dalam melakukan perjalanan. Adalah penting untuk mengerti profil wisatawan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan perjalanan mereka dan menyusun program promosi yang efektif.

Menurut Happy Marpaung profil wisatawan dapat dibedakan menjadi :¹⁸

- a. Kebangsaan.
- b. Umur, jenis kelamin dan status.
- c. Kelompok Sosial-Ekonomi.
- d. Konvesi dan Konferensi
- e. Wisatawan dengan minat khusus.

d) Manfaat Ekomomi Wisata

Dapat terlihat bahwa usaha untuk mencapai kemakmuran masyarakat harus terdapat kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam melakukan hidup dan kehidupan manusia. Sebagai

¹⁸Drs. Happy Marpaung, Pengetahuan Pariwisata, Alfabeta, Bandung 2002 hal 39

mana tercantum dalam tujuan terbentuknya negara sebagai sebuah kesepakatan untuk mencapai kemakmuran itu.

Karakteristik ekonomi dari pariwisata menjelaskan macam-macam dampak dari pariwisata yang dimiliki masyarakat. Ada dua dampak dari pariwisata. *Pertama*, wisatawan tidak menghasilkan jumlah yang banyak. *Kedua*, permintaan dipengaruhi oleh musim.

Prof. J. C. Riatceldt dalam bukunya *Pengajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan* menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhinya untuk memungkinkan hidup atau memperoleh kesenangan dalam penghidupannya.¹⁹

Keuntungan-keuntungan yang nyata yang banyak pengaruhnya dalam perekonomian adalah²⁰:

1. Bertambahnya kesempatan kerja.
2. Meningkatnya penerimaan pendapatan nasional (National Income), yang berarti pula income perkapita juga bertambah.
3. Semakin besarnya penghasilan pajak (Tax Revenue).
4. Semakin kuatnya Neraca Pembayaran Luar Negeri (Net Balance Payment).

¹⁹Drs. Oka A. Yoeti, Pemasaran Pariwisata, Angkas Bandung, 1985, hal 20

²⁰ibid hal 22

Dampak ekonomi pariwisata juga ada yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Dampak yang langsung datang dari uang yang nyata digunakan oleh wisatawan didaerah tujuan wisata.

Dan menurut Happy Marpaung keuntungan ekonomi pariwisata terdiri dari :

1. Angka pendapatan, berpengaruh langsung dan tidak langsung menembus pendapatan dalam batas wilayah pertambahan.
2. Penukaran pendapatan upah luar negeri.
3. Kecenderungan impor, besarnya keuntungan tempat tujuan wisata ialah dari masuknya uang wisatawan asing.
4. Tenaga kerja asing,
5. Penanaman modal.
6. Angkatan Pendapatan.
7. Pendapatan Pemerintah.
8. Jabatan.
9. Kemajuan bisnis pengusaha kecil
10. Nilai Ekonomi

Dan beberapa perhatian ekonomi tentang pariwisata yaitu :

- a. Inflasi dan Nilai Tanah.
- b. Sifat Musiman
- c. Pelayanan Masyarakat.
- d. Nilai Kesempatan.
- e. Pariwisata yang sangat bebas.

3. Kebijakan Sektor Wisata

Kemajuan bidang pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah dalam memberikan dukungan dan kebijakan pemerintah dalam hal kepariwisataan.

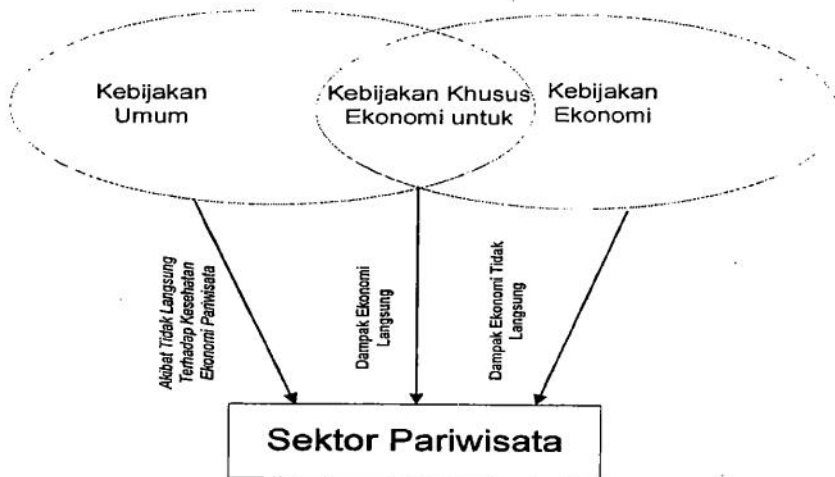
Dengan adanya perkembangan politik dan hukum yang menempati posisi yang supremasi di Indonesia, tentu setiap kebijakan sebaiknya dilandaskan dengan konsederans yang lengkap, agar arah setiap pembangunan nasional menjadi lebih jelas dan bermanfaat.

Secara empiris ternyata negara yang menghalalkan cara menentukan bentuk produk wisata yang dijual, terjebak dan ternyata bukan memberikan kontribusi kemaslahatan untuk rakyat malahan sebaliknya menimbulkan dampak yang destruktif dan endemik.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-undang tentang kepariwisataan yaitu Undang-undang no. 9 tahun 1990 sebagai hukum positif terhadap pengelolaan objek wisata di Indonesia. Dan melihat juga kepada undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, untuk itu diharapkan pemerintahan daerah lebih memperhatikan perkembangan potensi wislayahnya sebagai sumber pendapatan dan untuk kemaslahatan umat atau penduduk yang ada didaerah tersebut.

Gambar I.4.

Kebijakan Ekonomi dan Pariwisata Pemerintah



Sumber : Happy Marpaung, *Pengetahuan Pariwisata*, Alfabeta Bandung,2000, Hal 66.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada didalam pokok permasalahan.

Jadi definisi konseptual merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup dan batasan persoalan, sehubungan dengan definisi konseptual yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan

Merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu ataupun kelompok yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Termasuk didalamnya adalah upaya mentranspormasikan keputusan kedalam tahap operasional untuk mencapai perubahan besar maupun kecil seperti yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, ataupun merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan.

2. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

3. Kebijakan Sektor Pariwisata

Kebijakan Sektor pariwisata merupakan sebuah bagian yang sangat penting dalam mendukung perkembangan kepariwisataan disuatu wilayah wisata. Karena kebijakan yang terbentuk dapat berdampak baik dan buruk bagi kemajuan pariwisata dan masyarakat yang berada dikawasan objek wisata itu.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, maka dapat diketahui ukuran variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya hasil dari pengukuran variabel tersebut. Tolok ukur dari analisis penerapan kebijakan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan Goa Wisata Seplawan adalah :

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kab. Purworejo Tentang Pengelolaan Goa Wisata Seplawan.

1. Peraturan Bupati tentang Wisata Goa Seplawan.
2. Program kerja dinas pariwisata
 - a. Konsep Pengembangan Goa Wisata Seplawan.
 - b. Persiapan dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Purworejo
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan Goa Wisata Seplawan.
3. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Dalam mencapai tujuan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif-Analitis.

Penelitian Deskriptif mempunyai ciri-ciri²¹

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masyarakat sekarang dan maslaah-maslaah yang aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan kemudian dianalisis.

Jadi dalam penelitian yang memiliki metode deskriptif analitis adalah data tentang masalah yang telah diteliti disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis.

2. Unit Analisa Data.

Adapun unit analisa data dalam penelitian ini adalah :

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh KABAG Pariwisata Kabupaten Purworejo Bpk Sumarno.
- b. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dusun Katerban, Ds. Donorejo, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo, yang diwakili oleh Kepala Desa Donorejo yang menjabat sebagai Ketua POKDARWIS yaitu: Bpk Suparman.
- c. Masyarakat Dusun Katerban, Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Camat Kaligesing yaitu Bpk

²¹Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta bandung, 1999 hal 44

Binarno Heri Purnomo dan sekelompok pelajar yang berasal dari dusun kateban itu sendiri yaitu: Dona Arvanto, Eko, dan Sri Efisiensi.

3. Jenis Data

a. Data Primer.

Yaitu yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak terkait dalam hal persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan goa wisata Seplawan yang terletak di Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder.

Yaitu data dalam hal persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan goa wisata Seplawan yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen yang ada pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Wawancara Langsung.

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung secara mendalam dan mendetail kepada responden yang mempunyai peranan kunci dengan tidak menutup kemungkinan hadirnya informasi lain untuk memperoleh data objektif.

"Yang dimaksud metode interview adalah proses tanya jawab lisan dalam mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri."²²

b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan langsung dilapangan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diselidiki. Sutrisno Hadi memberikan pengertian observasi adalah, sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenoena-fenomena yang diselidiki.²³

c. Dokumentasi.

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, buku-buku, majalah, surat khabar maupun gambar-gambar atau grafik untuk melengkapi data terhadap masalah penelitian.

d. Metode Quesioner

Adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dala arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.²⁴ Metode questioner ini merupakan metode

²²Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach. Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal 4

²³ibid, hal 36

²⁴Suharismi Arikunto. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, Bandung, Rhireka Cipta, 1996, hal 139

yang digunakan untuk mengungkapkan data dari variabel dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data.

Menurut Palton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Teknik analisa data adalah analisa kuantitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisis data atas dasar teori yang ada serta memakai makna yang bersifat menyeluruh.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata gambaran dan angka-angka dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikab gambaran penyajian. Laporan tersebut diperoleh dari naska-naska wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian diuji dengan memperhatikan variabel, reliabilitas dan objektifitas.

Dalam menganalisa penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif. Sedangkan dalam penyajiannya, data-data dalam penelitian ini disajikan dalam dua bentuk yaitu secara kualitatif dan kuantitatif.

Penyajian kuantitatif yaitu dalam bentuk statistik deskriptif.

Fungsi dari statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat dan pemerintah

Kabupaten Purworejo terhadap pengembangan objek wisata goa Seplawan melalui kuesioner. Kemudian data-data yang diperoleh dicari indeknya dengan rumus :

$$I = \frac{F + F + F + F}{N}$$

Dimana : I = Indeks

F = Nilai Sampel

N = Jumlah Sampel

6. Populasi

*"Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas ; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudain ditarik kesimpulannya."*²⁵

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

7. Teknik Sampling

Menurut Prof. Dr. Sigiyono, sampel adalah²⁶ :

"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populas."

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono Metode Penelitian Bisnis Alfabeta Bandung 1999 hal 72

²⁶ Ibid hal 73

Misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang pelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Sampling adalah cara/teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Dalam suatu penelitian tidak perlu mengambil keseluruhan populasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Suharsimi Arikuto, yaitu :

“Pada hakekatnya dalam suatu penelitian tidak perlu diteliti semua individu didalam suatu populasi, karena akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang besar.

Sampel yang diambil peneliti diharapkan dapat menggambarkan hasil yang sesungguhnya”²⁷

²⁷Suharsini Arikuto, Manajemen Penelitian, Jakarta, 1990